DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (BW). Jakarta: Bina Aksara.

Ashofa, Burhan. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Cetakan II Jakarta: Rineka Cipta.

Damanhuri, H.A. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.

Darmabrata, Wahyono. 1997. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Cet.1, Jakarta : FH UI.

Djais, Mochamad. 2008. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro.

H.Hilman, Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hadi Kusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, Djuhaendah. 1983, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menuju Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico.

J. Meleong, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT.Citra Aditya.

Nuroniyah, Wardah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV.Citra Utama.

Prawirohamidjojo, R Soetejo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Prawirohamidjojo, R Soetejo. *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 1964. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu.* Bandung: Sumur Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.

R. Soetojo Marthalena, Pohan. 2008. Hukum Orang dan Keluarga Pohan. Surabaya: UNAIR.

Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja, 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW.* Jakarta: Hidakarya Agung.

Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Tarsito.

Satrio, J. 1993. *Hukum Perkawinan, Cet. I.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindu Persada.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.

Wantijk Saleh, K, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yunanto, 2019. Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan. Semarang : Kilat Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Reglemen Acara Perdata (Rv).

Het Haerziene Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Artikel Jurnal

Hidayat, Firman. 2017. Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Akta Unissula : Volume IV Nomor 4, hlm. 595.

Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, *copyright* 2001-2002, http://www.duniaibu. org/html/ perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada hari Jumat, pada tanggal 8 Januari 2020, pukul 19.00 WIB.

Mahkamah Agung Reublik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 " tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin".

Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company), hlm,36-37.

D. Wawancara

Ngadino, Notaris Kota Semarang, Wawancara, pada tanggal 16 November 2020.

Ria Kusumawardhani, Notaris Kota Semarang, Wawancara, pada tanggal 27 November 2020.

Zulaicha, Notaris Kota Semarang, Wawancara, pada tanggal 20 November

2020.

E. Website

https://doktorhukum.com/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian-kontrak/ diakses pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 12.00 WIB

Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah?, http:// www.danareksa.com/, diakses pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 20.00 WIB

Republika online, "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?", Minggu, 18 Februari 2001,(http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, pada pukul 18.00 WIB.